



**SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
(SKM)
TRIWULAN II TAHUN 2026**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Visi Misi dan Tujuan	2
	1.3. Struktur Organisasi	3
	1.4. Tujuan dan Manfaat	4
	1.5. Ruang Lingkup	4
BAB II	METODE SURVEI	
	2.1 Metode Survei	5
	2.2 Instrumen Survei	5
	2.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	5
	2.4 Populasi dan Sampel	6
BAB III	HASIL SURVEI	
	3.1 Deskripsi Responden	7
	3.2 Hasil Identifikasi Per Unsur Pelayanan	8
	3.3 Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	11
	3.4 Hasil Survei Tindak Lanjut	13
BAB IV	KESIMPULAN	
	4.1 Kesimpulan	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka akuntabilitas pelayanan publik, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pendayagunaan aparatur negara bidang pelayanan publik melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, yang bertujuan antara lain untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak, sesuai dengan asas-asas umum pemerintah dan korporasi yang baik dan terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta Keputusan Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik, dimana dalam pasal 33 tercantum tentang Survei Kepuasan Masyarakat dan dasar pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat, serta Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat serta dalam rangka menunjang percepatan pelaksanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Kebijakan tersebut dibuat dalam upaya merespon keluhan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang ada di semua unit pelayanan milik pemerintah guna menampung berbagai keluhan masyarakat atas kinerja pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah baik pelayanan di bidang perizinan, administrasi, pendidikan maupun pelayanan di bidang Kepegawaian.

Keluhan masyarakat yang tidak segera direspon oleh pemerintah akan dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu upaya peningkatan kualitas Pelayanan Kepegawaian kepada masyarakat maupun kepada Pegawai Negeri Sipil sendiri merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan oleh semua jajaran aparatur.

Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan yang telah dilaksanakan, telah dipetakan pendapat responden mulai dari pelayanan dan kemampuan petugas sampai kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil saat berurusan dengan petugas di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam sistem kepegawaian secara nasional, Pegawai Negeri Sipil memiliki posisi penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan difungsikan sebagai alat pemersatu bangsa, sejalan dengan kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka ada sebagian kewewenangan di bidang kepegawaian untuk diserahkan kepada daerah yang dikelola dalam sistem kepegawaian daerah.

Adapun Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan di atur didalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu: membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan terletak di Jalan Kapten P.Tendean No.6 Palembang, dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh 21 (dua puluh satu) orang Pejabat Struktural terdiri dari Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 5 orang dan Eselon IV sebanyak 15 orang. Sampai dengan bulan Maret Tahun 2026, pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 80 orang PNS dan PPPK yang terdiri dari 37 orang laki-laki dan 43 orang perempuan. Berdasarkan strata pendidikan terdiri dari 41 orang S2, 33 orang S1, 3 orang D3, dan 3 orang yang berpendidikan SLTA/ sederajat, sedangkan berdasarkan golongan terdiri dari 23 orang golongan IV, 42 orang golongan III dan 1 orang golongan II.

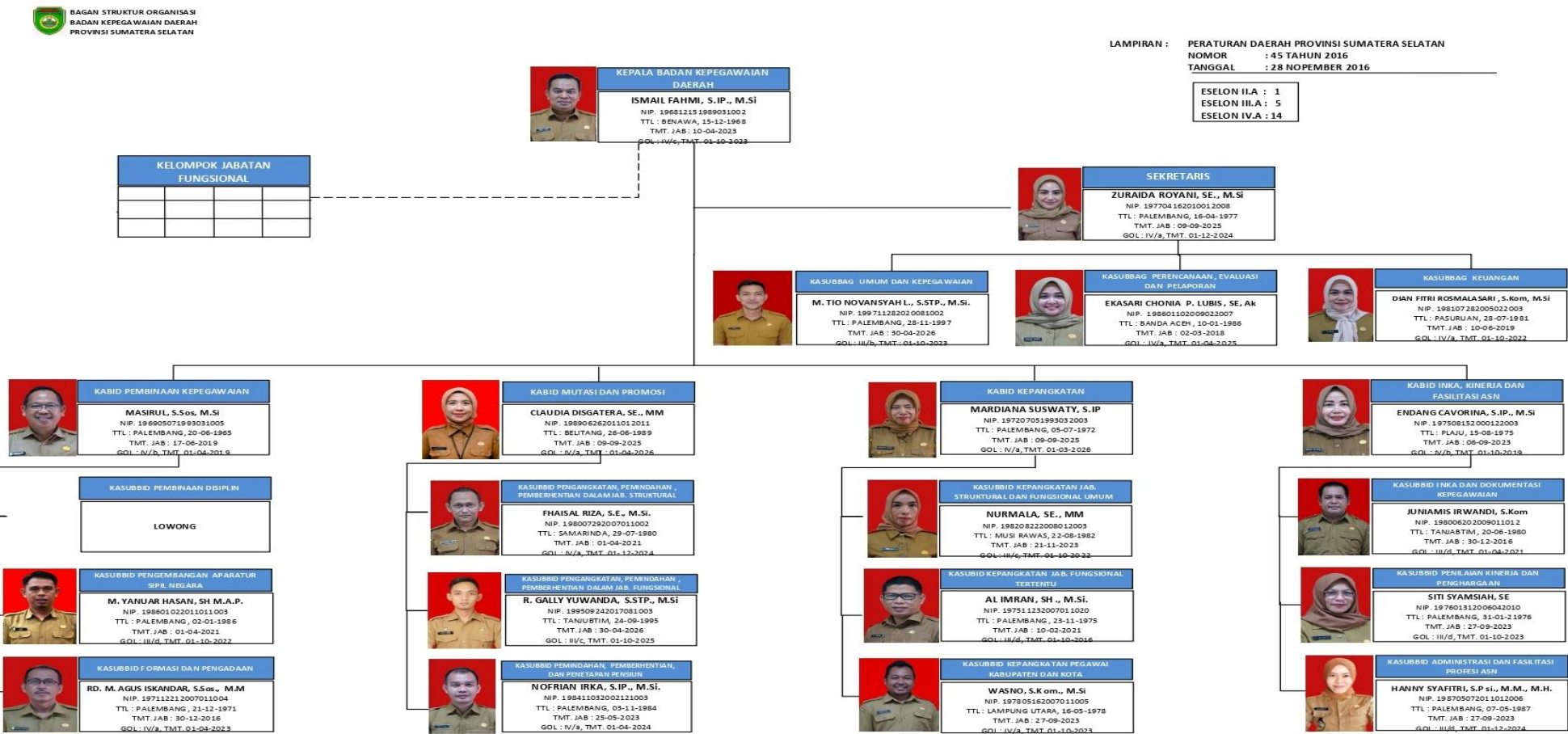
1.2 Visi, Misi dan Tujuan

Visi : “**Sumsel Maju Terus untuk Semua.**“

Misi : “Meningkatkan Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis *Digital*, menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas.“

Tujuan : “Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara yang Efektif dan Efisien dalam Pelayanan Publik secara Profesional”

1.3 Struktur Organisasi



1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1. Tujuan Umum

Mengetahui gambaran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap mutu pelayanan pada Badan kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2. Tujuan khusus

- a. Mengetahui kinerja pelayanan kepegawaian yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Mengetahui unsur-unsur pelayanan terendah yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil keputusan dalam upaya meningkatkan pelayanan.
- c. Mendorong staf untuk memberikan pelayanan lebih baik lagi.

1.4.3. Manfaat

Dengan diperolehnya gambaran pada pencapaian setiap unsur pelayanan, kedepan diharapkan akan membawa manfaat bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

- a. Meningkatnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- b. Mempermudah pimpinan menentukan prioritas Program Kegiatan yang harus dilaksanakan dalam upaya menunjang peningkatan kualitas pelayanan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.5 Ruang Lingkup

Pelaksanaan Survei bertempat di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu di Sekretariat, Bidang Pembinaan Kepegawaian, Bidang Mutasi dan Promosi, Bidang Kepangkatan dan Bidang Informasi Kepegawaian, Kinerja Aparatur dan Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara.

BAB II

METODE SURVEI

2.1. Metode Survei

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode survei dengan daftar pertanyaan berupa kuisisioner yang akan diisi oleh para responden.

2.1.1 Variabel penelitian

Variabel yang dipakai adalah 10 unsur yang relevan, valid dan reliabel sebagai unsur minimal yang harus ada di dalam pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 16 tahun 2014 yaitu :

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya / Tarif
5. Produk Layanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Maklumat Pelayanan
9. Penanganan Pengaduan
10. Sarana dan Prasarana

2.2 Instrumen Survei

Instrumen yang dipakai adalah kuisisioner, sebelum diminta untuk mengisi kuisisioner dilakukan penjelasan kepada responden tentang maksud dan tujuan survey serta ditanyakan apakah mereka bersedia menjadi responden. Kepada responden diminta untuk memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya agar dapat memberikan masukan kepada Badan kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

2.3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Ruang Pelayanan Kepegawaian.

2.3.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juni Tahun 2026.

2.4 Populasi dan Sampel

2.4.1 Populasi

Populasi adalah semua penerima pelayanan dari masing-masing unit pelayanan di Badan kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.2 Sampel

Sampel dalam survei ini dikumpulkan secara proporsional sebanyak **40 orang responden** sepanjang Triwulan II Tahun 2026, yang tersebar merata di 4 (empat) bidang pelayanan (masing-masing 10 responden).

BAB III
HASIL SURVEI

3.1 Deskripsi Responden

3.1.1 Jenis Kelamin

Sebanyak 45% responden berjenis kelamin Laki-laki dan sisanya 55% adalah Perempuan.

Tabel 1. Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (org)	%
1.	Laki-laki	18	45
2.	Perempuan	22	55
Total		40	100

3.1.2 Pendidikan

Sebagian besar responden berpendidikan Strata 1 sebanyak 50% diikuti Strata 2 sebanyak 43% dan Diploma 7%.

Tabel.2 Pendidikan Responden

No.	Pendidikan	Jumlah (org)	%
1.	SD	-	-
2.	SMP	-	-
3.	SMA	-	-
4.	Diploma	3	7,5
5.	S1	20	50
6.	S2	17	42,5
Total		40	100

3.1.3 Pekerjaan

Sebagian besar responden bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar 72,5%, Tni sebesar 5%, Polri sebesar 7,5%, Swasta sebesar 7,5% serta Wiraswasta sebesar 7,5%.

Tabel.2 Pekerjaan Responden

No.	Pekerjaan	Jumlah (org)	%
1.	PNS	35	87,5
2.	TNI	2	5
3.	Polri	2	5
4.	Swasta	1	2,5
5.	Wiraswasta	-	-
6.	Lainnya	-	-
Total		40	100

3.2 Hasil Identifikasi Per Unsur Pelayanan

3.2.1. Persyaratan

Sebagian besar responden merasa persyaratan pelayanan sesuai dan sangat sesuai, yaitu sebesar 50% menyatakan sesuai dan sebesar 50% yang menyatakan sangat sesuai.

Tabel 3. Pendapat responden tentang kemudahan Persyaratan pelayanan

No.	Kemudahan Pelayanan	Jumlah (org)	%
1.	Tidak sesuai	-	-
2.	Kurang sesuai	-	-
3.	Sesuai	20	50
4.	Sangat sesuai	10	50
Total		40	100

3.2.2. Prosedur Pelayanan

Sebagian besar responden merasa prosedur pelayanan mudah yaitu sebesar 52,5% yang menyatakan pelayanan mudah, sebesar 47,5% yang menyatakan pelayanan sangat mudah.

Tabel 4. Pendapat responden tentang kesesuaian prosedur pelayanan

No.	Kesesuaian Persyaratan	Jumlah (org)	%
1.	Tidak mudah	-	-
2.	Kurang mudah	-	-
3.	Mudah	21	52,5
4.	Sangat mudah	19	47,5
Total		40	100

3.2.3. Waktu Pelayanan

Sebagian besar responden merasa waktu pelayanan melayani dengan cepat, yaitu sebesar 62,5% waktu pelayanan cepat, sebesar 37,5% waktu pelayanan sangat cepat.

Tabel 5. Waktu Pelayanan petugas yang melayani

No.	Waktu Pelayanan petugas pelayanan	Jumlah (org)	%
1.	Tidak cepat	-	-
2.	Kurang cepat	-	-
3.	Cepat	25	62,5
4.	Sangat cepat	15	37,5
Total		40	100

3. 2.4. Biaya / Tarif

Sebagian besar responden merasa kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan yaitu sebesar 57,5% yang menyatakan biaya/tarif gratis sedangkan responden yang menyatakan biaya/tarif murah sebesar 42,5%.

Tabel 6. Kewajaran Biaya / Tarif dalam pelayanan

No.	Biaya / Tarif	Jumlah (org)	%
1.	Sangat mahal	-	-
2.	Cukup mahal	-	-
3.	Murah	17	42,5
4.	Gratis	23	57,5
Total		40	100

3.2.5. Produk Layanan

Sebagian besar responden merasa produk layanan sesuai yaitu sebesar 52,5% dan responden yang menyatakan petugas yang melayani sangat sesuai yaitu sebesar 47,5%.

Tabel 7. Produk Layanan

No.	Produk Layanan	Jumlah (org)	%
1.	Tidak sesuai	-	-
2.	Kurang sesuai	-	-
3.	Sesuai	21	52,5
4.	Sangat sesuai	19	47,5
Total		40	100

3.2.6. Kompetensi Pelaksana

Sebagian besar responden merasa petugas Kompeten dan sangat kompeten melayani, yaitu sebesar 52,5% petugas kompeten dan sebesar 47,5% responden menyatakan petugas sangat kompeten.

Tabel 8. Kompetensi / Kemampuan Pelaksana

No.	Kompetensi/ kemampuan Petugas	Jumlah (org)	%
1.	Tidak Kompeten	-	-
2.	Kurang Kompeten	-	-
3.	Kompeten	21	52,5
4.	Sangat Kompeten	19	47,5
Total		40	100

3.2.7. Perilaku Pelaksana

Sebagian besar responden merasa pelayanan yang diberikan petugas sopan dan ramah sebesar 42,5% dan responden yang menyatakan pelayanan yang diberikan petugas sangat sopan dan ramah sebesar 57,5%.

Tabel 9. Perilaku Pelaksana

No.	Perilaku Pelaksana	Jumlah (org)	%
1.	Tidak sopan dan ramah	-	-
2.	Kurang sopan dan ramah	-	-
3.	Sopan dan ramah	17	42,5
4.	Sangat sopan dan ramah	23	57,5
Total		40	100

3.2.8. Maklumat Pelayanan

Responden yang merasa maklumat pelayanan dalam pelayanan sudah diterapkan sepenuhnya yaitu sebanyak 60%, responden yang menyatakan diterapkan tetapi kurang maksimal sebesar 40%.

Tabel 10. Maklumat pelayanan

No.	Maklumat Pelayanan	Jumlah (org)	%
1.	Tidak ada	-	-
2.	Ada tetapi tidak diterapkan	-	-
3.	Diterapkan tetapi kurang maksimal	16	40
4.	Diterapkan sepenuhnya	24	60
Total		40	100

3.2.9. Penanganan Pengaduan

Responden yang merasa penanganan pengaduan telah dikelola dengan baik sebesar 47,5%, sebesar 50% yang menyatakan berfungsi kurang maksimal serta yang menyatakan tidak ada sebesar 2,5%.

Tabel 11. Penanganan Pengaduan

No.	Penanganan Pengaduan	Jumlah (org)	%
1.	Tidak ada	1	2,5
2.	Ada tetapi tidak berfungsi	-	-
3.	Berfungsi kurang maksimal	20	50
4.	Dikelola dengan baik	19	47,5
Total		40	100

3.2.10. Sarana dan Prasarana

Responden yang merasa Sarana dan Prasarana telah dikelola dengan baik sebesar 67,5% dan yang menyatakan berfungsi tetapi kurang baik sebesar 32,5%.

Tabel 12. Sarana dan Prasarana

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah (org)	%
1.	Tidak ada	-	-
2.	Ada, tetapi tidak berfungsi	-	-
3.	Berfungsi, tetapi kurang baik	13	32,5
4.	Dikelola dengan baik	27	67,5
Total		40	100

3.3 Survei Kepuasan masyarakat Terhadap Pelayanan di Badan kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 14 :Hasil nilai rata-rata unsur pelayanan Badan kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun 2026

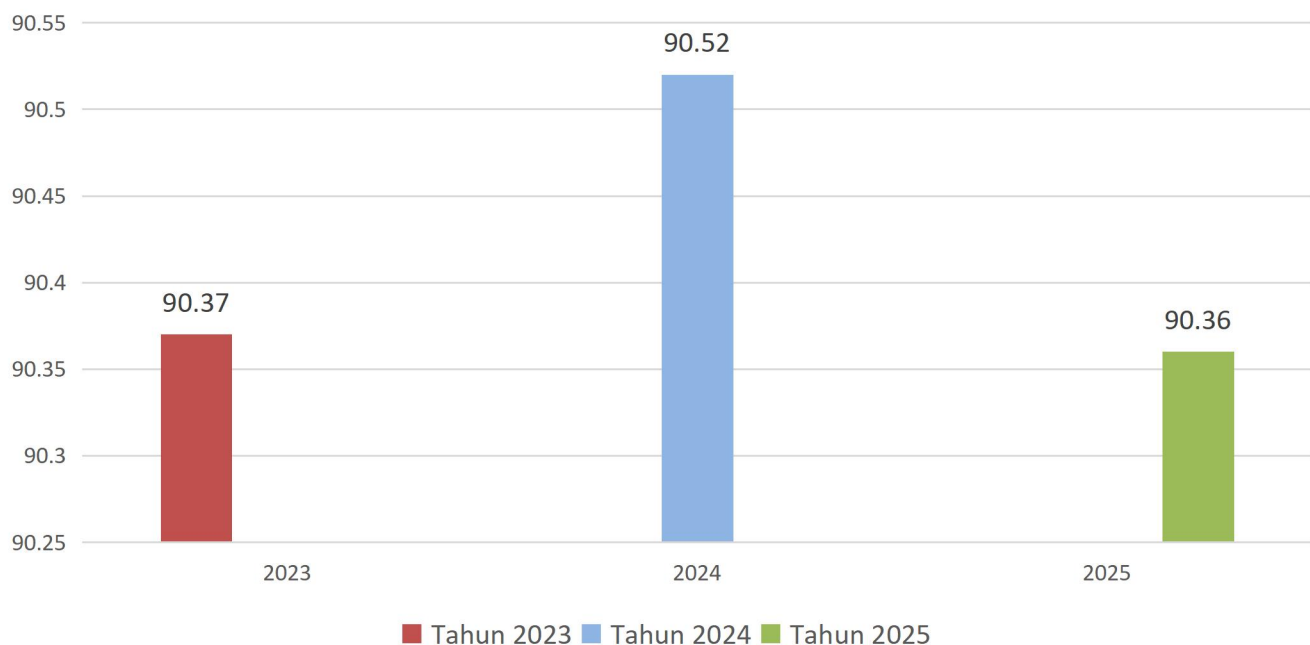
NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA RATA
U1	Persyaratan	3,50
U2	Prosedur pelayanan	3,48
U3	Waktu pelayanan	3,38
U4	Biaya / Tarif	3,58
U5	Produk layanan	3,48
U6	Kompetensi pelaksana	3,48
U7	Perilaku pelayanan	3,58
U8	Maklumat pelayanan	3,60
U9	Penanganan Pengaduan	3,43
U10	Sarana dan Prasana	3,68
Nilai rata rata tertimbang		351,50
Nilai SKM		87,88
Mutu Pelayanan		B
Kinerja Pelayanan		BAIK

Dari data 10 (sepuluh) unsur pelayanan di atas, terlihat bahwa unsur pelayanan ke-3 yaitu **Unsur Waktu Pelayanan (U3)** memperoleh Nilai Rata-Rata Unsur terendah sebesar **3,38** (Nilai Tertimbang: **84,38**). Meskipun memegang nilai terendah di antara unsur lainnya, nilai ini telah mengalami peningkatan signifikan dibandingkan capaian Triwulan I yang sebelumnya berada pada angka 3,08. Berdasarkan skala interval konversi Menpan-RB, unsur waktu pelayanan ini sudah berada dalam kategori **Sangat Baik** (rentang 3,26 – 4,00)

Tabel 15. Tabel nilai persepsi, interval, mutu pelayanan dan kinerja pelayanan.

Nilai persepsi	Nilai interval IKM	Nilai interval konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1 - 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik
2	1,76 - 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 -100	A	Sangat Baik

Adapun diagram hasil evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2023-2025 ialah sebagai berikut :



Dari grafik tersebut di atas, Nilai IKM Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan pada tahun 2025, dengan rincian nilai IKM pada tahun 2023 sebesar 90.37, tahun 2024 sebesar 90.52 dan tahun 2025 sebesar 90.36. Adapun yang menjadi faktor terjadinya penurunan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan tersebut terletak pada unsur Waktu Pelayanan. Sehubungan dengan hal tersebut Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan terus berkomitmen untuk segera mengatasi hal tersebut guna memberikan rasa nyaman pada seluruh masyarakat dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi serta kualitas SDM yang memadai dalam hal ini pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah dibekali kompetensi agar bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang hadir untuk menyelesaikan urusan sesuai dengan kepentingannya masing-masing.

3.4 Hasil Survei Tindak Lanjut

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan survei SKM Triwulan II Tahun 2026 dan telah menindaklanjuti nilai unsur terendah pada setiap Triwulannya, Adapun terdapat rencana aksi tindaklanjut dari unsur terendah terhadap 10 (sepuluh) unsur pertanyaan di dalam survei yang ada, Jumlah Responden 40 (empat puluh) orang, aksi tindaklanjut dari unsur terendah menurut data hasil survei adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Tindak Lanjut

No	Variabel / Unsur Pelayanan Yang Mem Peroleh Nilai Rata-Rata Terendah	Tindaklanjut	Keterangan
1.	Waktu Pelayanan (unsur 3)	- Mengevaluasi kembali penerapan SOP E-layanan, sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan. - Mengoptimalkan pemanfaatan sistem komputasi data kepegawaian terintegrasi pada masing-masing bidang untuk memangkas waktu tunggu verifikasi dokumen fisik dan mempercepat penerbitan SK.	Bukti Dukung sebagaimana terlampir.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang dilaksanakan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan II Tahun 2026, telah dilaksanakan survei komprehensif menggunakan kuesioner terstruktur kombinasi metode manual dan online kepada 40 orang responden penerima layanan kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Jumlah responden yang mengisi kuisisioner sebanyak 40 orang, jenis kelamin responden paling banyak Laki-laki yaitu 16 (enam belas) orang atau sebesar 40% dan hampir seluruh responden bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang atau sebesar 72,5%.

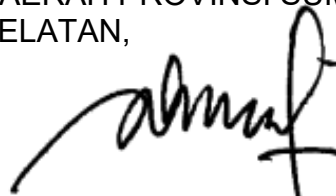
Berdasarkan hasil analisis data survei kepuasan masyarakat tersebut, diperoleh gambaran objektif bahwa unsur pelayanan dengan capaian nilai tertinggi adalah **unsur Sarana dan Prasarana (U10)** dengan nilai rata-rata **3,68** (Nilai Tertimbang: **91,88**). Di sisi lain, unsur pelayanan dengan nilai terendah adalah **unsur Waktu Pelayanan (U3)** dengan nilai rata-rata **3,38** (Nilai Tertimbang: **84,38**), yang mengindikasikan adanya tren efisiensi waktu yang membaik dari triwulan sebelumnya.

Secara keseluruhan, akumulasi nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan II Tahun 2026 adalah **87,88**. Nilai SKM ini masuk ke dalam kategori interval konversi **81,26 - 100,00**. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **Mutu Pelayanan BKD Provinsi Sumsel berada pada kategori B** dengan tingkat **Kinerja Unit Pelayanan BAIK**.

Demikian Demikian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang telah dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan, semoga dokumen laporan ini dapat menjadi instrumen evaluasi yang valid guna memacu transformasi pelayanan publik kepegawaian daerah yang prima dan berbasis digital, semoga dengan telah dilakukannya survei ini dapat memberikan manfaat dan berdampak pada meningkatnya seluruh unsur pelayanan.

Palembang, Juni 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN,



H. ISMAIL FAHMI, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196812151989031002